

# PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



## **Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 *Unaudited* dan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020**

Pontianak (15/03/2021) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menerima penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (LKPD Provinsi Kalbar TA) 2020 *unaudited* dari Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Barat, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan BPK Kalbar. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat **M. Kebing L.**, Gubernur Kalimantan Barat **Sutarmidji**, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, **Marlyna**, dan Pejabat Struktural BPK Kalbar serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2020.

LKPD Provinsi Kalbar TA 2020 diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, **Sutarmidji**, dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar, **Rahmadi** dengan menandatangani berita acara serah terima penyerahan. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan jajarannya yang telah menyelesaikan LKPD Provinsi Kalbar TA 2020 *unaudited* tepat waktu. Sesuai dengan amanat pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD *Audited* selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD *unaudited*. Dengan demikian, Kepala Perwakilan meminta dukungan dan Kerjasama dari Pemda agar pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2020 yang akan segera dimulai dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penyerahan IHPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2020 merupakan perwujudan amanat pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota dalam melaksanakan evaluasi dan *benchmarking*, serta DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD.

IHPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang diserahkan memuat ringkasan dari 23 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 15 LHP Keuangan, 5 LHP Kinerja, dan 3 LHP PDTT. Selain itu juga IHPD memuat ringkasan 166 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik (Banparpol) dari APBD, pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah (keruda).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam 23 LHP, BPK mengungkapkan 213 temuan yang memuat 306 permasalahan senilai Rp17.174.243.176,30. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. Kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 123 permasalahan;
2. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 139 permasalahan; dan
3. kinerja yang tidak efektif sebanyak 44 permasalahan.

Pada semester pertama tahun 2020, BPK Kalbar melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2019 dan PDTT pertanggungjawaban dan penerimaan banparpol pada 15 Pemda di wilayah Kalimantan Barat. Pemeriksaan LKPD TA 2019 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** untuk 13 pemda dan dua pemda dengan opini **Wajar Dengan Pengecualian**. Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2019 dilaksanakan atas 166 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) parpol se-Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 101 LPJ (60,85%) sesuai (S) dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, 62 LPJ (37,35%) sesuai dengan pengecualian (SDP) dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, satu LPJ (0,60%) tidak sesuai (TS) dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, dan dua LPJ (1,20%) yang tidak dapat diberikan simpulan (TMS).

Pada semester kedua tahun 2020, BPK Kalbar telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 pada lima entitas yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara, serta PDTT kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada dua entitas pemeriksaan yaitu pada Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau. Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya **cukup efektif**, sedangkan pada Kabupaten Kayong Utara **kurang efektif**. Hasil pemeriksaan PDTT menyimpulkan bahwa kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada kedua pemda **"sesuai dengan pengecualian"**. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-

kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

LHP yang diterbitkan BPK Kalbar pada periode 2004 – 2020 mengungkapkan sejumlah 4.807 temuan pemeriksaan dengan 11.399 rekomendasi senilai Rp547.499.752.809,93, dan telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp271.362.549.874,63. Hasil pemantauan TLRHP sampai dengan Semester II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belum ditindaklanjuti, sebanyak 79 rekomendasi senilai Rp2.025.736.562,51 (0,69%);
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.969 rekomendasi senilai Rp232.338.255.174,43 (17,27%);
3. Telah sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 9282 rekomendasi senilai Rp298.150.244.520,20 (81,44%);
4. Tidak dapat ditindaklanjuti, sebanyak 68 rekomendasi senilai Rp14.985.520.160,93 (0,60%).

Pemantauan keruda sampai dengan semester II Tahun 2020 pada BPK Kalbar sebanyak 3.924 kasus keruda senilai Rp555.099.006.309,34 pada 15 Pemda. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa sampai dengan semester II Tahun 2020 tingkat penyelesaian atas keruda yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah ditetapkan pada pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi penyelesaian melalui pengangsuran sebanyak 1.869 kasus (47,63%) senilai Rp118.685.769.489,88, sudah pelunasan sebanyak 2.054 kasus (52,34%) senilai Rp91.001.156.984,38 dan penghapusan sebanyak 1 kasus (0,025%) senilai Rp26.462.446,00.

Efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika LHPnya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa, dimana salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari Pimpinan dan para anggota DPRD.

**SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN**  
*BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR*